

# Media Sangat Siginifikan Bagi Pembentukan Opini Publik

**P**ERUBAHAN di dalam kehidupan masyarakat, merupakan suatu yang tidak akan pernah berhenti, terlebih lagi di era globalisasi dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat, serta meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi, akuntabilitas, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan demokratisasi, demikian antara lain amanat Kapolri pada Serah terima jabatan Kabik, Korsahli, Kadiv Binkum, Kadiv Humas, Ses NCB Interpol, Kapolda Jabar, Kapolda Bali, Kapolda Kalbar dan Kapolda Gorontalo.

Lebih jauh Kapolri mengatakan, perubahan tersebut dapat berlangsung secara evolusioner maupun revolusioner, yang pergerakannya dapat dirasakan dan menyentuh setiap sendi kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut telah memberikan kontribusi positif dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, diantaranya di bidang teknologi dan informasi, yang telah memberikan kemudahan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Bahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang demikian pesat, telah muncul pula temuan-temuan baru yang bermanfaat bagi umat manusia. Namun disisi lain, perubahan tersebut juga memberikan permasalahan yang perlu diantisipasi secara serius, terutama bagi terselenggaranya keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena tersebut sudah nampak jelas ketika Polri sebagai penyelenggara keteraturan sosial. Sudah tidak dapat lagi hanya menggunakan cara-cara tradisional dan manual. Dalam mendeteksi dan meminimalisasi berbagai ancaman dan



gangguan kamtibmas yang ada. Hal ini dapat terlihat dari merembaknya kejahatan berdimensi baru. Dengan berbagai variasi dan modus operandi yang canggih dan sulit pembuktiannya, sehingga dalam pengungkapannya pun perlu menggunakan peralatan, metode, cara berfikir dan bekerja yang baru, modern dan canggih pula.

Memahami perubahan yang pasti datang disertai karakteristiknya yang cenderung penuh ketidakpastian ini, kita tentu tidak bisa hanya diam dan berpangku tangan saja menunggu perubahan tersebut, kemudian baru tersadar dan terkejut. Dalam menghadapi datangnya perubahan, hal yang paling tepat untuk kita lakukan adalah mengerti dan memahami bagaimana melakukan perubahan organisasi agar mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan tuntutan perubahannya. Tahapan manajerial yang seharusnya dilakukan adalah menanamkan pada seluruh komponen

organisasi, bahwa perubahan organisasi penting untuk dilakukan dengan meyakinkannya melalui penyampaian berbagai fakta dan data adanya "Gap" antara kinerja organisasi dengan harapan masyarakat.

Kemudian merancang dan melaksanakan perubahan yang dilakukan berdasarkan analisa yang mendalam melalui pengelolaan data yang *up to date*, bersifat bottom up, lengkap dan dapat dipercaya, sehingga perubahan yang dijalankan "tidak kontra produktif" tetapi benar-benar mengarah pada upaya perbaikan organisasi, yang dilakukan secara konsisten dan berlanjut, guna mencapai visi, misi tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Selain itu, yang lebih penting lagi adalah menanamkan komitmen pada diri kita masing-masing untuk mau berubah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dengan kualitas yang terbaik. Komitmen ini perlu disampaikan untuk men-



jadi perhatian kita bersama mulai dari anggota Polri yang berpangkat yang tertinggi sampai pangkat terendah dan dari level pimpinan sampai pelaksana, sehingga tidak ada lagi sebagian dari kita yang berpikir dan bekerja keras melakukan reformasi diri, sementara yang lainnya hanya melihat atau menunggu tanpa inisiatif dan proaktif dalam merespon perkembangan dilingkungkannya. Kita semua harus ingat bahwa apa yang kita kerjakan pada hari ini hasilnya akan kita rasakan pada hari esok.

Menindak lanjuti perlunya kita untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam organisasi Polri, kita semua tentu sependapat jika perubahan tersebut akan semakin cepat dan memberikan dampak yang lebih luas bila dilakukan oleh personil Polri yang berada dalam tataran pimpinan. Kita telah memahami bahwa peran pimpinan di dalam organisasi Polri merupakan faktor yang sangat penting dan dominan, kerena ditangan seorang pimpinan organisasi tersebut dapat mencapai arah tujuan yang dikendaki, ditangan pimpinan pula diskrepansi/kesenjangan antara keadaan yang diinginkan (*das sollen*) dan keadaan nyata (*das sein*) dapat diperkecil. Tegasnya dapat dikatakan bahwa baik buruknya organisasi Polri terletak ditangan seseorang yang berada pada tataran Polri dan hal ini berarti jika seorang pada tataran tersebut menghendaki perubahan, maka suatu keniscayaan bila suatu yang bersifat mendasar dan penting di dalam organisasi akan berubah pula. Terutama ha-hal yang menyangkut perubahan dalam perilaku, perubahan dalam sistem nilai dan penilaian, perubahan dalam metode dan cara bekerja. Perubahan dalam cara berfikir dan bersikap, serta perubahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya organisasi dan lain sebagainya.

Menyadari tentang apa yang

diuraikan Kapolri tersebut di atas, hari ini secara bersama telah menyaksikan prosesi perubahan personel-personel Polri yang mendudukkan jabatan pada tataran pimpinan. Perubahan ini tentu disertai harapan bahwa personel yang di tunjuk sebagai pejabat baru, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu sebagai pimpinan Polri menekankan beberapa hal untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh pejabat baru.

#### **Kepada Kabaintelkam Polri yang baru Irjen Pol Drs. Saleh Saaf.**

Pahamilah bahwa jabatan Saudara adalah mata dan telinga bagi pimpinan dan organisasi, oleh karena itu galang dan perluas terus jaringan informasi yang dapat berfungsi sebagai *early warning* dan *early detection* yang dapat meng-cover seluruh dinamika sektor kehidupan masyarakat, sehingga transformasi gangguan Kamtibmas, mulai dari embrio sambil muncul menjadi peristiwa actual dapat diketahui lebih dini dan secara mendalam. Bangunlah sistem pendataan intelijen yang mampu menjadikan data-data dan informasi yang cepat, aktual dan dapat dipercaya. Suplai setiap analisa intelijen yang bermanfaat bagi satuan fungsi kepolisian lainnya, agar pelaksanaan tugas Kepolisian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Fokuskan perhatian Saudara pada tempat-tempat yang rawan terjadinya konflik bersifat komunal serta ancaman terror, terutama yang bernuansa Sara dan dampaknya berkepanjangan.

#### **Kepada Korsahli Kapolri yang baru Irjen Pol Drs. E. Winarto H, SHG, MSi.**

Ketahuilah bahwa Saudara memegang posisi sebagai koordinator "thik tank organisasi Polri" yang berfungsi sebagai pemikir, dimana masukannya sangat dibu-

tuhkan, untuk membawa organisasi ini menuju perubahan yang diinginkan. Berbagai permasalahan rumit yang saat ini sedang dihadapi Polri, hendaknya dikaji secara mendalam sehingga ditemukan solusi yang cerdas, berlian dan dapat diterapkan di lapangan.

#### **Kepada Kababinkum Polri yang baru, Irjen Pol Drs. Teguh Soedarsono.**

Berilah saran, masukan dan nasehat hukum terhadap setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh Polri. Kajilah produk-produk hukum yang berlaku atau sedang dirancang, baik yang bersifat eksternal/lintas departemen maupun internal Polri, yang bertentangan, tumpang tindih dan menghambat pelaksanaan tugas Polri. Buatlah jaringan komunikasi dengan departemen-departemen yang terkait dengan tugas Polri, untuk memonitor perkembangan aturan hukum yang sedang dihabas, sehingga kita dapat berkontribusi dan bersinerji, serta proaktif dalam upaya penertiban aturan hukum yang ada,

#### **Kepada Kadivhumas yang baru Brigjen Pol Drs. Sisno Adiwinioto.**

Sadarilah bahwa peran media dewasa ini sangat signifikan bagi pembentukan opini publik. Oleh sebab itu Saudara sebagai corong Polri, harus mampu mengkomunikasikan setiap dinamika tugas-tugas Polri di lapangan, utamanya yang menjadi perhatian masyarakat. Pencitraan Polri dalam kehidupan masyarakat dan baik buruk hubungan Polri dengan masyarakat, sangat ditentukan oleh apa yang Saudara ungkapkan pada khalayak ramai. Oleh karena itu pegang benar prinsip-prinsip berkomunikasi massa dan jaga hubungan yang baik dengan mitra kerja Polri dan para insan media massa.

#### **Kepada Ses NCB Interpol yang baru, Kombes Pol Drs.**



**I s k a n d a r  
H a s a n.**

Kembangkan hubungan yang luas dan erat dengan organisasi p e n g e m b a n fungsi Kepolisian Internasional, baik itu yang menyangkut p e n g e m b a n wawasan Sumber Daya Manusia Polri, perluasan jaringan informasi kriminal internasional dan teroganisir, maupun dalam rangka melakukan tindakan Kepolisian yang diarahkan untuk mencegah dan menindak kejahatan lintas negara.

Kepada Kapolda-Kapolda yang baru, Irjen Pol Drs. Sunarko Danu Ardanto, Irjen Pol Drs. Paulus Purwoko MDA, Brigjen Pol Drs. Zainal Abidin Ishak dan Kombes Pol Drs. Hendra Sukmana, MH.

Dalam masalah keamanan dan ketertiban lanjutkan hal-hal positif yang telah dilakukan pejabat lama, dan kuasai karakteristik daerah dimana Saudara-saudara bertugas. Pahami suku bangsa, adat tradisi, norma-norma sosial dan kebudayaan setempat. Kecermatan Saudara dalam menerapkan gaya kepolisian yang berorientasi pada warna lokal (*local colour policing*) sangat dituntut disini, sehingga strategi, kegiatan dan tindakan-tindakan Kepolisian yang telah diformulasikan secara terencana, efektif dan efisien benar-benar dapat memelihara keteraturan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Perhatikan strategi Porpolisian Masyarakat (Polmas) yang saat ini sedang kita laksanakan. Ketahuilah bahwa landasan utama yang ditekankan dalam Polmas ini adalah terwu-



judknya hubungan baik dan tulus antara Polisi dengan warga masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.

Dalam penegakan hukum, tindak tegas para pelaku tindak pidana yang merugikan kekayaan negara dan meresahkan masyarakat. Lakukan tindakan penegakan hukum yang obyektif transparan akuntabel, proporsional dan profesional guna menjamin kepastian dan rasa keadilan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan penghormatan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Dalam bidang perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; Wujudkan perilaku anggota yang dapat menciptakan perasaan tentram, damai dan terlindungi. Lakukan pengawasan yang ketat pada satuan fungsi-fungsi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wujudkan sistem birokrasi Polri yang tidak berbelit-belit dan cenderung mempersulit kepentingan masyarakat. Arahkan setiap anggota Kepolisian menuju pencapaian kehidupan masyarakat yang

aman, adil, makmur dan sejahtera.

Kemudian berkaitan dengan satuan Kepolisian yang Saudara pimpin, identifikasi segala sumber daya yang dipertanggung jawabkan kepada Saudara, untuk dapat digunakan sebagai penggerak roda organisasi dan memotivasi anggota dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Lakukan pengembangan dan pembinaan kekuatan sesuai dengan kewenangan yang Saudara miliki secara transparan dan kuntabel. Berikan Reward and Punishment kepada anggota secara seimbang, jelas dan tegas.

Sebelum mengakhiri sambutannya Kapolri menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pejabat lama, atas dedikasi dan pengabdian selama ini. Kiprah, semangat dan dan kerjakeras yang Saudara-saudara tampilkan selama bertugas di tempat lama, hendaknya dapat dijadikan sebagai modal awal untuk memulai tugas di tempat baru.\*\*\*

*Disarikan dari Sambutan Kapolri pada Acara Serah Terima Jabatan KABIK, Koorsahli, Kadiv Binkum, Kadiv Humas, Ses NCB Interpol, Kapolda Jabar, Kapolda Bali, Kapolda Kalbar dan Kapolda Gorontalo Di Gedung Pupattama Jakarta.*





## Pegang Prinsip Bahwa Hukum Adalah Pengatur di Atas Pengatur

**H**INDARKAN penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan kejahatan sebagai selimut, menjustifikasi perbuatan yang menyimpang dengan menguntungkan diri pribadi atau golongan tertentu dan tidak berkiblat pada upaya mencapai rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum. Agar memegang prinsip bahwa hukum adalah pengatur di atas pengatur. Lakukan tindakan penegakan hukum yang mencegah terjadinya pencurian kekayaan negara dan penggelapan pendapatan negara, agar APBN meningkat, pembangunan berjalan cepat,

kesejahteraan rakyat membaik termasuk kesejahteraan gaji anggota Polri. Pesan tersebut, disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto, pada acara serah terima jabatan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Gubernur Akademi Kepolisian (Akpil), Kapolda Kaltim dan Kalteng, di Rupatama Mabes Polri, Jakarta.

Lebih jauh Kapolri mengatakan; dalam melaksanakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Kapolri mengingatkan, hindarkan tindakan diskriminasi. Tindakan kepolisian yang dilaksanakan,

harus benar-benar berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan perorangan atau sekelompok orang. Sehingga citra Polri sebagai alat negara yang mandiri dan dapat dipercaya oleh masyarakat, dapat dibentuk.

Dalam penegakan hukum, hindarkan penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan dengan memanfaatkan kelemahan dari aturan yang ada sebagai selimut, untuk menjustifikasi perbuatan yang menyimpang dengan menguntungkan diri pribadi atau golongan tertentu dan tidak berkiblat pada upaya mencapai rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum. "Dengan banyak intervensi yang menyimpang, terhadap kewenangan yang diberikan hukum, agar memegang prinsip bahwa hukum adalah pengatur di atas pengatur," tandas Kapolri.

Pada kesempatan tersebut, Sutanto menekankan bahwa peran pejabat di tataran pimpinan, dalam organisasi Polri merupakan faktor yang sangat penting, karena ditangan seorang pimpinan, organisasi dapat mencapai arah tujuan yang dikehendaki atau tidak, nilai-nilai, norma-norma dan pranata-pranata organisasi dapat hidup dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan setiap tindakan. "Bahwa baik buruknya organisasi Polri, ditentukan sebagian besar oleh manusia Polri yang mengawaknya dan titik sentralnya, pada tataran pimpinannya," ucap Sutanto.

Demikian halnya, pada jabatan Gubernur PTIK, Gubernur Akpol, Kapolda Kaltim dan Kapolda Kalteng, adalah jabatan yang berada di tataran pimpinan yang menentukan kualitas hasil pada lingkungan pembinaan dan operasional, posisi yang sangat signifikan bagi penentuan kinerja dan perkembangan Polri ke depan.

Karena itu, serah terima jabatan tersebut, lanjut Kapolri sebagai hal yang wajar dan kebutuhan



**Kepada pejabat yang menerima tugas baru, Kapolri menaruh harapan. Tidak sekedar harapan, tetapi mampu dan dapat dipercaya untuk mengemban jabatan tersebut. Mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan jabatannya. "Tidak saja kepada keluarga, masyarakat ataupun kepada hukum, juga kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mengetahui segala apa yang ada dalam hati, pikiran kita dan segala sesuatu yang kita lakukan".**

organisasi, upaya pelestarian organisasi dengan melalui proses regenerasi dan penyegaran personel, baik dalam bentuk *tour of duty* maupun *tour of area*, sehingga tingkat estafet tidak terputus, untuk menapak masa depan menuju Polri yang lebih baik dan dipercaya masyarakat, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara keamanan dalam negeri (Kamdagri).

Kepada pejabat yang menerima tugas baru, Kapolri menaruh harapan. Tidak sekedar harapan, tetapi mampu dan dapat dipercaya untuk mengemban jabatan tersebut. Mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan jabatannya. "Tidak saja kepada keluarga, masyarakat ataupun kepada hukum, juga kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mengetahui segala apa yang ada dalam hati, pikiran kita dan segala sesuatu yang kita lakukan".

Pada bagian lain Kapolri meminta pejabat baru, Gubernur PTK, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Drs. DPM Sitompul, SH MH dan Gubernur Akpol, Brigadir

Jenderal (Brigjen) Polisi Drs. T Asikin Husein, agar membina personel-personel Polri yang berkualitas sebagai pimpinan, yang akan mengisi struktur organisasi Polri ke depan, dibentuk dan dilahirkan. "Saya menginginkan sungguh-sungguh agar pejabat baru mempelajari segala persoalan yang saat ini berkembang, berpotensi mengganggu kelancaran belajar mengajar dan menghambat lahirnya hasil didik yang berkualitas." Lakukan *brainstorming*, dialog, observasi maupun wawancara secara langsung pada setiap sektor lingkungan pendidikan, sehingga mempunyai data-data dan informasi aktual, yang cukup untuk membangun rencana-rencana dan program-program pendidikan ke depan," perintah Kapolri.

Sehubungan hal tersebut, Kapolri menginstruksikan agar dapat menyelenggarakan pendidikan dengan memperhatikan 3 bidang, yaitu:

Aspek mental kepribadian, terkait masalah moral dan etika profesi kepolisian ini, diharapkan dapat menanamkan dan mengembangkan budaya yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, loyalitas terhadap kebenaran, keadilan dan cinta kepada kemanusiaan. Harapan yang masih bersifat abstrak ini, hendaknya dijabarkan hingga menjadi tradisi, kebiasaan, aturan-aturan yang operasional, dipedomani dan diyakini kebenarannya oleh anak didik dalam bersikap dan berperilaku. Sehingga timbul ketahanan moral dan mental yang tangguh terhadap setiap godaan ketika mereka bekerja di lapangan.

Kapolri menginstruksikan agar, budaya kekerasan yang masih menjadi kebanggaan para taruna atau taruni di Akpol, segera dihilangkan. "Lakukan reformasi secara total, dengan melakukan pola pengasuhan yang membangun budaya bangga pada etika, moral dan kemampuan intelektual".



Pada bidang akademik, Kapolri meminta, jangan pernah memberikan toleransi, terhadap setiap sikap dan perilaku individu yang dapat mencederai etika akademik. Aktifkan dosen-dosen yang berkualitas, dan mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap dunia pendidikan. Lakukan perbaikan kurikulum, termasuk metode dan bahan pengajarannya yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Kerjasama dengan semua pihak, seperti universitas-universitas dan lembaga-lembaga pendidikan, baik di dalam negeri dan luar negeri, dapat dikembangkan, kata Kapolri meminta perhatian pejabat baru.

Untuk kesamaptaan dan kesehatan fisik, Kapolri mengingatkan, hal ini tidak ditinggalkan. Meski pada akademik, penguasaan ilmu pengetahuan hal yang utama, namun kesehatan fisik modal utama untuk berkarya. "Bentuk kesadaran dan kebiasaan yang memotivasi diri anak didik, untuk mau dan peduli memelihara kesamaptaan dan kesehatan dirinya sendiri," ucap Kapolri

Kepada Kapolda baru, Kapolda Kaltim, Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Indarto dan Kapolda Kalteng Komisaris Besar (Kombes) Polisi Dinar, kata Kapolri, sebagai pejabat yang mudah dilihat, dinilai oleh masyarakat merupakan seorang figur publik. Dituntut untuk memberikan keteladanan melakukan hal-hal yang baik dengan kualitas terbaik. Keteladanan dalam membimbing, mengayomi dan melayani masyarakat, sekaligus para anggota Polri sebagai pelaksana tugas di lapangan.

Diharapkan pula, mampu memotivasi anggota untuk mengajar keteraturan dan menemukan ketidakteraturan untuk ditindaklanjuti dalam solusi yang baik. Saya tidak ingin, anggota Polri menjadi pemicu atau penyebab, bagi terganggunya keteraturan sosial. Kapolri mengingatkan seraya memint agar melaksanakan dengan serius dan sungguh-sungguh

tanggungjawab keamanan dalam negeri (Kamdagri), yang telah dipercayakan masyarakat kepada Polri, dengan menjadikan republik ini sebagai "rumah" yang aman, nyaman dan tenteram untuk berkarya dan berinvestasi. Untuk itu, Kapolri meminta pejabat baru, agar masyarakat dijauhkan dari ketakutan akan kejahatan yang mengancam, dengan menekan setiap tindakan yang bersifat "premanisme". "Dorong masuk, penggelaran dan adu kekuatan serta kekerasan, di jalan-jalan ke ruang-ruang hukum yang telah disediakan." imbaunya.

**"Pahamilah bahwa, landasan utama yang ditekankan dalam Polmas ini adalah, terwujudnya hubungan baik yang tulus antara polisi dengan warga masyarakat, dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban," perintah Kapolri. Saya ingin tidak hanya pandai "berbicara di belakang meja" tetapi mau turun ke lapangan, memotivasi anggota dan melakukan analisa melalui pengamatan langsung di lapangan agar ikatan emosi antara saudara dengan anggota semakin kuat.**

Pada kesempatan yang sama, Sutanto meminta agar diperhatikan strategi Perpolisian Masyarakat yang saat ini sedang kita laksanakan. "Pahamilah bahwa, landasan utama yang ditekankan dalam Polmas ini adalah, terwujudnya hubungan baik yang tulus antara polisi dengan warga masyarakat, dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban," perintah Kapolri. Saya ingin tidak hanya pandai "berbicara di belakang meja" tetapi mau turun ke lapangan, memotivasi anggota dan melakukan analisa melalui pengamatan langsung di lapangan agar ikatan emosi antara saudara dengan anggota semakin kuat.

Semua keputusan yang diambil cepat, tepat dan dapat dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri di lapangan. Lakukan pengendalian dan pengawasan setiap kegiatan operasional Kepolisian, pada tempat, waktu dan kegiatan yang rentan terjadinya penyimpangan," perintah Kapolri.

Sebelum mengakhiri amanatnya, Kapolri mengucapkan terima kasih, kepada pejabat yang lama, Muhammad Farouk, MD. Primanto, DPM Sitompul dan Ardjunan Walan, karena telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit, bagi kemajuan Polri. "Yakinlah, bahwa apa yang telah diberikan secara tulus dan ikhlas untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara ini, akan selalu tercatat dalam sejarah Polri," ucapnya di hadapan Wakapolri dan Irwasum Polri, pejabat utama Mabes Polri, Ketua Umum Bhayangkari dan tamu undangan yang hadir.

Bagi mantan Gubernur Akpol dan PTIK, Kapolri meminta walau tidak aktif lagi sebagai anggota Polri, agar tetap memberikan saran, masukan dan idenya, untuk membangun Polri agar menjadi lebih baik, karena sebagai salah satu bhayangkara dan cendikiawan terbaik, yang dimiliki Polri. \*\*\*

*Disarikan dari Sambutan Kapolri pada acara Serjibab Gubernur PTK, bemur AKPOL, Kapolda Kaltim dan Kapolda Kaltim di Rupattama, Jakarta.*



MARAKNYA penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja. Namun, telah menyebar luas ke pinggiran kota sampai kota-kota kecil. Bahkan ke pedalaman dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Penyalahgunaan Narkoba rata-rata terjadi pada kelompok usia produktif, jauh lebih banyak laki-laki dibanding perempuan dan lebih tinggi di kota daripada di pedesaan. Pernyataan tersebut, dikemukakan Kalakhar BNN, Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Drs. I Made Mangku Pastika di Kantor BNN, Cawang, Jakarta, Selasa (6/6).

Terungkapnya kasus manufaktur Narkoba yang dikategorikan "terbesar ketiga" di dunia dengan pengungkapan berantai dari Banten, Batu dan Banyuwangi telah membuat kita tersadar bahwa masalah Narkoba menjadi hal yang krusial bagi Bangsa Indonesia. Menurut Kalakhar BNN, multifaktor yang menjadi bahan analisis telah memengaruhi semakin meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah Indonesia. Secara geografis, Indonesia berpenduduk kurang lebih 220 juta. Dengan wilayah yang demikian luas, negara kita cenderung menjadi sangat rawan, mengingat potensi pasar dan sulitnya teknis pengawasan. Faktor lain, kata Made, secara sosial adalah ketersediaan Narkoba, individu dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut sangat signifikan berkorelasi meningkatkan peredaran gelap Narkoba di Indonesia. Kondisi yang lebih meresahkan adalah tingkat prevalensi HIV/AIDS mencapai 50,1 persen sepanjang tahun 2005 yang diakibatkan oleh IDU's (Injecting Drugs Users). Kenyataan ini, mendorong BNN mengadakan penelitian pada tahun 2005 bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Pranata Universitas Indonesia mengenai Survei Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba



## Usia Produktif Masih Mendominasi Penyalahguna Narkoba

Kelompok Rumah Tangga di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di 23 lokasi, yang terdiri dari 16 kota dan 7 pedesaan di 16 provinsi dengan melibatkan 4.355 rumah tangga dan 20.303 orang responden yang terdiri dari 47 persen laki-laki dan 53 persen perempuan. Dari penelitian ini, menurut mantan Kapolda Bali itu, dihasilkan kesimpulan bahwa penyalahgunaan narkoba rata-rata sudah dimulai pada usia 10-19 tahun dan tertinggi kelompok umur 20-29 tahun. Lebih banyak terjadi di kota dibandingkan di pedesaan dan di rumah kos dibandingkan di rumah tangga, khususnya laki-laki. Yang menarik dari penelitian ini, adalah angka penyalahguna Narkoba

rata-rata terjadi pada kelompok usia produktif, jauh lebih banyak laki-laki dibanding perempuan dan lebih tinggi di kota daripada di pedesaan. Hasil penelitian lain, BNN bekerja sama dengan Puslitkes-UI tahun 2004 tentang biaya ekonomi dan sosial akibat penyalahgunaan Narkoba di 10 kota besar di Indonesia. Perkiraan besaran biaya ekonomi khususnya konsumsi Narkoba di Indonesia dalam tahun 2004 sekitar Rp 23,6 triliun.

Berdasarkan hasil survei itu, diperkirakan rata-rata biaya satuan perorang di kalangan coba pakai sebesar Rp 68.000 yang teratur pakai sebesar Rp 1,5 juta dan pecandu sebesar Rp 7,8 juta



dalam setahun terakhir. Bila dikalikan dengan jumlah seluruh penyalahguna Narkoba, maka diperkirakan minimal uang yang beredar di bisnis Narkoba mencapai Rp 12 triliun per tahun. Sedangkan, biaya sosial penyalahgunaan Narkoba akibat kriminalitas diperkirakan mencapai Rp 4,2 triliun. Jumlah penyalahguna Narkoba sebanyak 1,5 % atau sebesar 3,256 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia 217.076.600 jiwa. Menyadari kondisi tersebut, Kalakhar BNN menekankan bahwa sangat penting bagi kita untuk berupaya menanggulangi keterlibatan generasi muda dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Badan Narkotika Nasional sebagai salah satu institusi pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam hal penanggulangan masalah Narkoba, telah merumuskan berbagai kebijakan di bidang pencegahan, penegakan hukum, laboratorium terapi dan rehabilitasi maupun penelitian dan pengembangan informatika, untuk dapat diaplikasikan organisasi setingkat daerah, "BNP dan BNK".

Di pihak lain, Kalakhar BNN menyatakan Badan Narkotika Nasional merupakan penanggung jawab masalah Narkoba di Indonesia. Karena masuk salah satu kejahatan transnasional, BNN secara organisasional melakukan kerja sama dengan *International Agencies* untuk meningkatkan upaya penanggulangannya. *United Nations On Drugs and Crime (UNODC)* sebagai salah satu badan PBB yang menangani masalah Narkoba, telah menetapkan tanggal 26 Juni pada setiap tahunnya sebagai *International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking (IDADAIT)* yang diperingati oleh seluruh bangsa di dunia termasuk Indonesia. Lebih dikenal dengan Hari Anti Narkoba International (HANI). Untuk tahun ini tema yang diajukan UNODC adalah *Children and Drugs... Drugs are not Childs play*.

**Badan Narkotika Nasional sebagai salah satu institusi pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam hal penanggulangan masalah Narkoba, telah merumuskan berbagai kebijakan di bidang pencegahan, penegakan hukum, laboratorium terapi dan rehabilitasi maupun penelitian dan pengembangan informatika, untuk dapat diaplikasikan organisasi setingkat daerah, "BNP dan BNK".**

Sedangkan Indonesia lebih fokus dengan tema "Drugs are not Childs play". Alasannya HANI, karena memiliki makna bahwa anak-anak adalah elemen masyarakat yang paling rentan terhadap bahaya Narkoba yang destruktif.

Sasaran kampanye Narkoba terhadap orang tua, anggota keluarga, kerabat, kawan, tetangga, guru, pekerja sosial, wartawan, para politisi dan LSM harus mengawasi dan berbuat sesuatu demi kepentingan anak-anak. Dalam hal ini, anak-anak harus dijauhkan dari Narkoba sebab anak-anak inilah cikal bakal penerus kelangsungan suatu bangsa. Kalakhar BNN mengingatkan pula, kegiatan BNN bersama-sama LSM dan masyarakat luas menggelar beberapa acara memperingati HANI agar tidak

hanya bersifat ceremonial, tapi juga membangkitkan peringatan terhadap masalah Narkoba yang melanda bangsa Indonesia. Rangkaian acara BNN dalam sebulan, seperti: kampanye, seminar/lokakarya, penyuluhan, dialog interaktif, pemusnahan barang bukti, donor darah, kegiatan lomba olahraga dan pilot Project. Pada tanggal 24 Juni 2006 diadakan renungan "Malam Sejuta Lilin" di Bundaran HI dan pembubuhan seribu tanda tangan Say No To Drugs oleh aktifitas 12 LSM, artis, tokoh masyarakat dan pemasangan 2 spanduk terpanjang yang akan menjadi rekor MURI sepanjang 5 km. Spanduk ini, menjadi bukti nyata, tekad, komitmen dan partisipasi masyarakat yang ikut peduli melawan Narkoba. Jalan Sehat Anti Narkoba akan diadakan pada, 25 Juni 2006 dengan rute dari lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jalan Patimura, Patung Pemuda, Pintu 1 Senayan, Sisingamangaraja, Jalan Sudirman sampai Bundaran HI dan kembali ke Jalan Trunojoyo, Lapangan Bhayangkara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Acara puncak peringatan HANI di Istana Negara bersama Presiden, 26 Juni 2006, laporan Ketua BNN, peluncuran dan penandatanganan sampul pertama dan perangkolan HANI 2006 sebagai media sosialisasi kepada masyarakat, pencanangan *Community Based Unit Terapi/Rehabilitasi* berbasis agama, pemberian penghargaan pemerintah kepada masyarakat yang memberikan atensi, perhatian, sumbangsih, kontribusi dan pemikiran terhadap masalah Narkoba serta sambutan Presiden.

"Dengan pelaksanaan berbagai kegiatan ini dapat lebih menggerakkan dan menambah kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan Narkoba demi terciptanya Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015", demikian harapan Kalakhar BNN. \*\*\*

*Disarikan dari Amanat Kalakhar BNN pada acara Indonesia bebas Narkoba 2015 di Kantor BNN Cawang Jakarta Selatan.*



# Kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran dan Pendapat Harus Dijamin

POLRI sebagai penegak hukum ikut berperan aktif dalam rangka menegakkan hukum di bidang penyiaran. Kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, merupakan hak asasi manusia yang perlu dijaga kelangsungannya agar kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat ini dapat dilaksanakan sesuai dengan keadilan dan kebenaran. Seperti diatur pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat harus dijamin, demikian antara lain sambutan Wakapolri Komjen Pol. Drs. Adang Daradjatun, pada acara penandatanganan naskah kesepakatan (MoU) antara Polri dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Rupasama, Mabes Polri, Jakarta.

Lebih jauh Wakapolri mengatakan, KPI sebagai lembaga negara independen yang mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, sangat berkompeten memberikan masukan data dan dokumen yang menyangkut pelanggaran hukum pidana di bidang penyiaran untuk ditindaklanjuti oleh Polri.

Di era kebebasan pers saat ini, kata Wakapolri, media massa cetak dan elektronik merupakan sesuatu kekuatan yang dominan dalam membentuk opini masyarakat. Namun manakala kebebasan pers kebablasan, sering muncul fenomena lain, seperti pornografi, eksploitasi wanita dan anak-anak, bahkan "trial by the press". Sehingga kemungkinan akan terjadi pencemaran nama baik. Dengan demikian, pers juga dapat berurusan dengan hukum. Misalnya, ia mencontohkan pelanggaran terhadap UU No. 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran. Dalam pasal 36 ayat (5)



yang antara lain menyebutkan "Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian dan seterusnya". Terhadap pelanggaran tersebut, akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 10 miliar untuk penyiaran televisi yang melanggar ketentuan tersebut di atas.

Dengan keterlibatan peran dan partisipasi masyarakat dalam bidang penyiaran saat ini, Wakapolri menilai, pers sebagai salah "Satu kontrol masyarakat", untuk menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, kepada semua pihak diminta untuk secara bersama mengukuhkan tekad membangun sistem diseminasi informasi melalui penyiaran yang adil, merata dan

seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tetap menjaga keutuhan integrasi nasional dalam kemajemukan masyarakat Indonesia.

Pada bagian lain, Wakapolri menyampaikan terima kasih, kepada pihak KPI yang telah memberikan perhatian dan kontribusinya, untuk ikut serta dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan berperan aktif dalam menjunjung tinggi penegakan hukum di bidang penyiaran. "Bahwa apa yang sudah dirintis itu, menjadi salah satu wujud komitmen pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara,".

Wakil Ketua Komisi Penyiaran (KPI), Sinansari Encip turut mengingatkan fungsi media massa, termasuk radio dan televisi, antara lain fungsi mendidik dan mewariskan nilai-nilai berkelanjutan sangat penting. Nilai-nilai mendidik yang ditanamkan berupa



nilai-nilai positif dan peradaban bangsa yang terus-menerus dialihkan pada generasi berikutnya. Selain itu, radio dan televisi harus menyadari untuk memagari moral bangsanya. Kesadaran yang penuh tinggi, terutama dalam memagari generasi muda. Karena generasi muda adalah ahliwaris bangsa ini, merekalah yang nantinya mewarisi dan memperjuangkan bangsa ini, supaya tetap tegak dan jaya. "Mari kita jaga mereka, anak-anak muda itu titipan Tuhan," imbau Sinansari Encip.

Kata Sinansari, masyarakat menunggu hasil pelaksanaan, bagaimana kerja pihak lembaga penyiaran, masyarakat, KPI Pusat dan KPI Daerah dan para penegak hukum. Setiap kali ada gugatan tentang tindak pidana, belum ada tindak pidana yang dibawa ke pengadilan karena bersalah. "Jadi kami yang mewakili kepentingan dan membawa aspirasi masyarakat dan penyiaran terus-menerus

mencermati penyiaran. Kami memantau, merekam dan menyimpan berbagai siaran televisi dan siaran nasional serta berbagai hiburan dan sejenisnya. KPI berkewajiban melindungi publik," ungkapnyanya.

Usai ditandatangani MoU, ia berharap segala pekerjaan akan segera dilaksanakan. "Kita semua ingin tidak ada pengelola televisi yang dibawa ke pengadilan. Tapi sangat ingin tidak terjadi. Dalam upaya melindungi pemirsa harus bekerja dengan baik, makin cermat dalam rangka pembinaan mengembangkan sensor dari dalam. "Untuk itu, kami akan bekerja sama dengan Dewan Pers agar diperoleh kesepakatan agar mendapat perlindungan yang sepatutnya," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menkominfo Sofyan Djalil, mengingatkan semua pihak bahwa telah terjadi perubahan paradigma yang luar biasa dalam pengelolaan

media massa. "Untuk itu, harus diikuti dengan penegakan hukum sebagai bentuk dari tanggung jawab tersebut. Seperti diatur dalam pasal 28 G," ucapnya. Sofyan Djalil, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur satu langkahpun dari kebebasan pers, termasuk kebebasan penyiar. Tetapi dipihak lain, maka rule of law itu adalah satu sisi yang tidak bisa dipisahkan. "Penegakan disiplin akan memberikan manfaat yang baik, untuk bangsa ini. Karena akan memberikan nilai tambah bagi pemirsa tersebut," imbaunya.

Turut hadir dalam acara penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Polri dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Ketua Komisi I dan Ketua Komisi III DPRRI, Kepala Divisi Humas Mabes Polri serta pejabat utama Mabes Polri lainnya. \*\*\*

*Disarikan dari Amanat Kapolri pada Acara MoU Polri dengan Komisi Penyiaran Indonesia, di Jakarta*





# Korpri Dengan Semangat Dan Paradigma Baru, Harus Menjadi Organisasi yang Mandiri

BAGI sebuah organisasi, perjalanan waktu selama 35 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Sejak didirikan pada tanggal 29 Nopember 1971 hingga sekarang ini, KORPRI telah menunjukkan dharma bakti dan pengabdianya kepada masyarakat, Bangsa dan Negara. Berbagai peristiwa dan perubahan sosila politik, dengan suka dan dukanya, telah mewarnai perjalanan organisasi KORPRI, yang tetap kukuh hingga sekarang ini; demikian antara lain Sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia yang dibacakan Kapolri pada Hari Ulang Tahun KORPRI ke 35 bertempat di lapangan Upacara Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta tanggal 29 November 2006.

Lebih jauh Presiden RI. mengatakan anggota KORPRI sebagai aparatur pemerintah, seyogyanya dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Anggota KORPRI harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas sehari-hari terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hapuskan kesan bahwa aparatur negara sering lamban dalam memberikan pelayanan publik. Kesan ini memberikan citra yang tidak menguntungkan bagi birokrasi pemerintah. Marilah kita perbaiki kinerja Pegawai Negeri dalam setiap lingkup organsasi pemerintahan. Dengan cara itu kita dapat meningkatkan kemampuan aparatur agar lebih sigap dalam melayani kepentingan masyarakat. Dalam dimensi pelayanan sipil, baik yang berhubungan dengan kepentingan langsung orang per orang, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Izin Mengemudi, tidak boleh ditunda-tunda. Demikian pula dalam layanan public dalam kepentingan seluruh warga bangsa, seperti pelayanan rumah sakit, lembaga pendidikan dan transportasi umum, harus mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Saya mengajak seluruh jajaran kepengurusan KORPRI, untuk senantiasa menjaga keutuhan organisasi ini. Mengembangkan profesionalisme dan memperkuat netralitas anggotanya. Setiap Pegawai Negeri baik perorangan maupun komunitas dalam organisasi KORPRI, harus bersifat netral dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pegawai negeri tidak boleh memiliki afiliasi politik terbuka terhadap partai politik tertentu. Pegawai Negeripun tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, Pegawai Negeri harus memiliki keberpihakan terhadap nasib dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan serta kepedulian bagi setiap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bersama-sama

harus menjaga netralitas organisasi KORPRI agar tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan politik dari kekuatan politik tertentu. Anggaran Dasar KORPRI yang telah disempurnakan dan telah saya tetapkan dengan keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 pada tanggal 8 Juni 2005 yang lalu, dapat dijadikan haluan untuk mengarahkan organisasi KORPRI sebagai organisasi yang profesional dan netral.

Ditengah-tengah demokrasi yang terus bergulir di tanah air, pada saat ini di berbagai tempat telah dan akan berlangsung proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Saya mencermati, bahwa pada sejumlah daerah, terdapat aparatur pemerintahan daerah yang mengalami kegamangan posisi ketika terjadi pergantian



Kepala Daerah. Kegamangan itu sesungguhnya tidak perlu terjadi, jika kita menempatkan diri dalam posisi netral pada setiap pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, saya minta agar seluruh anggota KORPRI dapat menempatkan diri secara profesional ditengah berlangsungnya proses demokrasi di daerah. Agar saudara-saudara tidak terlibat dalam konflik politik yang tengah berlangsung, maka loyalitas Saudara-saudara kepada Bangsa dan Negara harus didahulukan.

Sebagai wadah berhimpun para penyelenggara pemerintah, KORPRI harus senantiasa peka terhadap setiap perkembangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Termasuk kepekaan terhadap setiap kritik yang ditujukan kepada perilaku dan kinerja birokrasi pemerintah. Setiap kritik dan saran dari masyarakat, merupakan masukan positif bagi perbaikan kinerja pemerintahan. Saudara-saudara tidak boleh alergi terhadap kritik. Jika ada kritik dan saran dari masyarakat, saudara-saudara para anggota KORPRI harus memberikan penjelasan secara tepat kepada masyarakat. Berikanlah informasi yang benar dan akurat, agar masyarakat mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Jika terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditindak lanjuti, maka segeralah melakukan tindakan nyata, agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara tepat waktu. Jangan sekali-kali menutup diri untuk mendegar dan menerima kritikan dari masyarakat. Jangan pula menutup diri untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

Dinamika kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan sekarang ini, menuntut setiap aparatur pemerintahan, untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya itu, adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, pada tataran structural, kita lakukan

melalui penataan kembali organisasi pemerintahan agar lebih tanggap terhadap tuntutan kepentingan masyarakat. Sementara reformasi birokrasi pada tataran cultural, kita lakukan melalui pengembangan profesionalitas dan penguatan etos kerja aparatur pemerintahan. Reformasi birokrasi yang kita jalankan, merupakan langkah terencana yang dilakukan Pemerintah, untuk membangun dan mengembangkan kinerja birokrasi pemerintahan.

Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan public dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Praktik-praktik KKN harus dikikis habis.

Kepada seluruh jajaran pemerintahan, saya minta agar memberikan sanksi yang tegas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika ditemukan praktik KKN. Tingkatkan efektivitas pengawasan aparatur negara baik melalui pengawasan fungsional, maupun pengawasan masyarakat. Selain memberantas praktik KKN, reformasi birokrasi harus kita jalankan dengan meningkatkan budaya kerja. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance. Para pegawai negeri harus didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif, efisien, dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara.

Saya ingin mengingatkan kepada seluruh anggota KORPRI, bahwa setiap pekerjaan dan jabatan yang diemban oleh pegawai Republik Indonesia, merupakan amanah yang harus ditunaikan dengan penuh rasa tanggung

jawab. Setiap pegawai negeri tunduk pada sumpah jabatan dan Panca Prasetya KORPRI. Oleh karena itu, saya minta kepada segenap anggota KORPRI untuk memegang teguh sumpah jabatan itu. Janganlah melalaikan tugas dan kewajiban, apalagi melanggar hukum dan sumpah jabatan. Jangan ada lagi pegawai negeri yang terlibat dalam kolusi, korupsi dan nepotisme serta pelanggaran hukum lainnya. Pemerintah akan bertindak tegas terhadap semua pelanggaran itu, tanpa pandang bulu.

Saya mengajak kepada seluruh anggota KORPRI, untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat alur birokrasi demi kepentingan rakyat yang memerlukan pelayanan segera. KORPRI dengan semangat dan paradigma baru, harus menjadi organisasi yang mandiri. Mengedepankan profesionalisme. Bebas dari berbagai pengaruh dan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Bebas dari tarik menarik di antara kekuatan partai politik yang ada.

Demikianlah beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada hari Ulang Tahun KORPRI yang membahagia ini. Mudah-mudahan, apa yang saya kemukakan tadi, dapat menjadi bahan renungan bagi seluruh jajaran KORPRI dan segenap aparatur negara. Kepada segenap anggota KORPRI dimana saja berada, sekali lagi saya ucapkan Selamat Ulang Tahun KORPRI ke-35. Semoga Saudara-saudara dapat meningkatkan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, Bangsa dan Negara.

Semoga dalam usia yang ke 35 tahun ini KORPRI akan berkembang menjadi organisasi yang makin solid dan profesional. Dengan organisasi yang solid dan profesional, para anggota KORPRI akan mampu meningkatkan tugas dan pengabdian secara lebih baik lagi.

*Disarikan dan Sambutan Tertulis Presiden RI pada HUT ke 35 Tanggal 29 November 2006*





KEMANUNGGALAN Brimob dan masyarakat, sejak dulu sudah kental bersatu mempertahankan Negara Kesatuan RI ini. Sebagai generasi penerus seluruh insan Brimob Polri berkewajiban melanjutkan perjuangan para pendahulu Korps Brimob Polri, yang telah membangun landasan demi tegaknya Pataka Korps Brimob Polri "Satya Sakti Yanottama", sebagai rasa penghargaan dan kebanggaan serta tanggung jawab Korps Brimob Polri, dalam menjamin keamanan, ketertiban masyarakat serta keutuhan Negara Kesatuan RI.

Lebih jauh Kapolri menyatakan Peringatan Hari Ulang Tahun Korps Brimob Polri ini, juga merupakan momentum untuk melakukan retrospeksi dan introspeksi diri, sejauhmana Korps Brimob Polri telah melaksanakan perannya serta mendarma-bhaktikan diri, sebagai salah satu komponen Polri, didalam mengemban tugas sebagai Bhayangkara Negara. Enampuluh satu tahun bukanlah waktu yang singkat dan mudah untuk dilalui, berbagai dinamika tentu telah mewarnai sejarah perjalanan keberadaan Korps Brimob Polri. Banyak yang telah diraih, namun juga tidak sedikit yang mesti dibenahi, perjalanan waktu tentunya telah mematangkan karakter pengabdian Korps Brimob Polri

# Brimob Polri Sebagai Mitra Masyarakat Siap Mewujudkan Rasa Aman

kepada masyarakat, Bangsa dan Negara.

Berbagai perubahan dan dinamika perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara, menuntut Korps Brimob Polri untuk terus menerus meningkatkan kualitas kinerja, secara professional dan proporsional yang dihadapkan kepada tantangan tugas Korps Brimob Polri yang semakin kompleks dimasa depan, utamanya yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme dan gangguan keamanan yang dapat membahayakan integrasi nasional dalam rangka mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan RI.

Sejiwa dengan visi dan misi Polri, Korps Brimob Polri telah

mengembangkan program-program dan strategi-strategi baru, yang ditujukan untuk menggeser paradigma lama yang konvensional dan represif, menjadi paradigma baru yang bernuansa Polisi Sipil, menghargai Hak Azasi Manusia, bersifat proaktif, inovatif dan kreatif serta mengutamakan tindakan preemtif dan preventif dalam masyarakat madani. Strategi perpolisian yang saat ini dianggap tepat, sudah dikembangkan dan diterapkan adalah Perpolisian Masyarakat (POLMAS). Oleh karena itu, sangat selaras bila pada hari ulang tahun Korps Brimob Polri ke 61 ini, kita mencanangkannya dengan tema "Brimob Polri sebagai mitra masyarakat siap mewujudkan



kan rasa aman". Sejalan dengan tema tersebut, sesungguhnya saya melihat bahwa secara konseptual dan operasional, Korps Brimob telah menjalankan apa yang telah digariskan dalam "kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat, dalam penyelenggaraan tugas Polri". Namun dalam kesempatan ini, perlu saya ingatkan kembali bahwa kerja sama Polisi dan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk kemitraan, merupakan kunci berjalannya strategi perpolisian masyarakat tersebut.

Oleh sebab itu, saya harapkan kerja sama ini tidak hanya dilaksanakan, dalam operasionalisasi penanggulangan kejahatan dan ketidak-tertiban sosial, tetapi juga dalam kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan sampai pengawasan/ pengendalian dan analisis/evaluasi atas pelaksanaannya, kerja sama tersebut harus kita pahami sebagai suatu proses yang terus menerus tanpa akhir, agar dapat kita kerjakan secara konsisten dan sungguh-sungguh dalam rangka menerapkan Perpolisian Masyarakat, pada setiap tugas-tugas Korps Brimob Polri. Pada era reformasi sekarang ini, masyarakat sangat mendambakan terwujudnya kehidupan yang lebih demokratis, pemerintahan yang bersih dan transparan, serta meningkatkan kinerja aparat yang profesional dan akuntabel. Dengan sendirinya, masyarakat juga sangat mendambakan sosok Brimob Polri yang lebih profesional, taat hukum, adil, bijaksana dan mejunjung tinggi hak azasi manusia dalam menjalankan tugasnya. Tuntutan masyarakat yang demikian itu, dapat dipahami mengingat masyarakat mendambakan kehidupan yang lebih aman, tenteram dan damai.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam melangkah ke depan, Polri telah merumuskan suatu visi yaitu : " Terwujudnya postur Polri yang profesional,

bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum ". Rumusan visi ini, merupakan manifestasi atas harapan masyarakat terhadap kualitas Polri dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat untuk memenuhi harapan ini, Polri khususnya Korps Brimob Polri telah melakukan langkah-langka riil berkaitan dengan fungsi yang diembannya, beberapa prestasi yang dapat kita catat antara lain : Penanganan kejahatan dalam bentuk perlawanan terorisme atau wanteror di Batu Malang khususnya penjinakan bom, penguasaan dalam penyelesaian konflik

**Polri telah merumuskan suatu visi yaitu : " Terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum ".**

konflik yang masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti Poso, Ternate, Ambon, Papua.

Kita menyadari, prestasi tersebut layak dibanggakan dan dihargai, namun jangan menjadikan Korps Brimob lengah dan lupa diri. Jadilah Brimob Polri yang handal, ulet, loyal dan menguasai lima kemampuan Brimob Polri ( PHH, Resmob, Jibom, Wanteror dan SAR). Aplikasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari, motto pembinaan "tiada hari tanpa latihan", motto operasional "sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil ", dan motto pengabdian "jiwa ragaku demi kemanusiaan". Tun-

jukanlah dedikasi yang tinggi, tulus dan ikhlas, dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian yang telah dipercayakan masyarakat. Itu semua harus kita lakukan, karena kita harus ingat bahwa perjalanan masih panjang, perjuangan belum berakhir dan kedepan tugas-tugas akan semakin berat, sementara harapan masyarakat demikian besar kepada kita.

Pada kesempatan itu Kapolri menghimbau kepada seluruh Perwira, Bintara, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Korps Brimob Polri, untuk bersama-sama berperan aktif dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan Kamtibmas, membangun kemitraan dengan aparat terkait, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban yang kita dambakan.

Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyatukan langkah ke depan, dengan tekad yang bulat untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya, disertai do'a pada setiap derap pengabdian kita, agar kita diberikan kelancaran dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Mengakhiri sambutannya Kapolri menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kakor Brimob dan seluruh anggota Korps Brimob Polri dimanapun berada dan bertugas, atas pengabdian yang telah diberikan selama ini, Kapolri percaya sebagai insan Bhayangkara sejati pengabdian Korps Brimob tidak akan pernah surut, dan itu telah dibuktikan dengan diterimanya penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Nugraha Sacanti Yana Utama, yang menjadi catatan penuh makna sebagai wujud penghargaan tertinggi dari Negara, yang harus dijunjung tinggi, dihormati dan dipertahankan. "Maju terus Korps Brimob Polri, harapan dan kebanggaan Polri ada di pundak saudara-saudara".

*Disarikan dari sambutan Kapolri pada upacara HUT Brimob Polri ke 61 tanggal 14 Nopember 2006*



## PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA BERPERAN SERTA SECARA AKTIF DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PENGAMANAN LEBARAN 2006

SEBAGAI sebuah Perusahaan Asuransi yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh Polri Cq Yayasan Brata Bhakti bergerak di bidang Asuransi Umum (Kerugian dan Perlindungan), PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara senantiasa berupaya mengembangkan diri guna memperkecil resiko kerugian yang ditanggung oleh masyarakat dengan produk-produk antara lain:

### 1. Asuransi Khusus :

- a. Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi (AKDP) yang memberikan perlindungan/jaminan kepada pengemudi kendaraan bermotor yang memiliki SIM terhadap kecelakaan pada saat mengemudikan kendaraan bermotor.
- b. Asuransi Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga (ATJHK) yang memberi perlindungan kepada pemilik kendaraan bermotor atas tuntutan ganti kerugian oleh pihak ketiga dalam kecelakaan lalu lintas, meliputi Bodily Injury maupun Material Damage (kerusakan barang).
- c. Asuransi Kecelakaan Diri Anggota Polri (AKDA) yang memberikan jaminan kepada anggota Polri dan PNS Polri terhadap resiko kecelakaan pada saat melaksanakan tugas maupun di luar tugas.
- d. Asuransi Idaman Bhayangkara (ASIBHARA) yang memberikan manfaat Asuransi manakala terjadi resiko meninggal dunia (biasa/sakit atau gugur dalam tugas/kecelakaan), cacat tetap dan biaya pengobatan serta memberikan sejumlah dana pada saat masa pertanggungannya/pensiun/ berhenti. Peserta ASIBHARA ini bisa anggota Polri/PNS Polri maupun anggota Instansi lain yang masih berdinamis aktif.

### 2. Asuransi Umum, antara lain :

- a. Asuransi Kendaraan Bermotor yang menjamin kerusakan atau kehilangan akibat kecelakaan lalu lintas pada kendaraan bermotor.
- b. Asuransi Kebakaran yang menjamin kerugian kerusakan bangunan/barang akibat peristiwa kebakaran.
- c. Asuransi Kecelakaan Diri (personal accident) yang memberikan jaminan santunan kepada tertanggung akibat peristiwa kecelakaan serta penggantian biaya pengobatan.
- d. Surety Bond yaitu jaminan yang diberikan dari Pihak Asuransi (Surety) kepada Pemilik Proyek (Obligee) apabila Principal (Kontraktor) tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai kontrak.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, selama 7 (tujuh) tahun terakhir ini PT. Asuransi Bhakti ikut berperan serta secara aktif, dalam rangka pengamanan lebaran Tahun 2006 (1427 H), terutama



dalam mendukung para anggota Polri di lapangan, dengan prioritas jalur Pantura mulai Banten sampai dengan Jawa Timur. Dukungan tersebut antara lain berupa :

- a. Senter pengatur lalu lintas.
- b. Bingkisan natura untuk petugas lapangan.
- c. Spanduk berisi pesan-pesan untuk keamanan dan keselamatan dalam perjalanan.

Untuk Tahun 2006 ini pada tanggal 18 Oktober 2006, rombongan Tim PT. ABB Pusat bergabung dengan rombongan Dit. Lantas Babinkam Polri, Telkomsel dan PT. Asuransi Jasa Raharja dipimpin oleh Wadir Lantas Bapak Kombes Pol. Drs. Sulistyo Ishak langsung mengunjungi pos-pos pengamanan terdepan yaitu di Pos Sadang, Purwakarta maupun Pos Cikopo di Cikampek.

Pada kesempatan itu rombongan langsung menyerahkan bantuan tersebut di atas yang disambut gembira dan antusias oleh para petugas Pam Lebaran setempat serta diliput oleh media cetak dan elektronik maupun oleh Divisi Humas Polri.

Rombongan TIM PT. ABB Pusat juga menyerahkan bantuan kepada Polda Metro Jaya yang diterima oleh Dit. Lantas Polda Metro Jaya pada tanggal 20 Oktober 2006 diwakili oleh Kabag. Reg. Ident AKBP Drs. Imam, sedang kepada Polda Banten diserahkan pada tanggal 19 Oktober 2006 kepada Dir Lantas Polda setempat dan langsung didistribusikan kepada petugas di lapangan.

Sungguh menarik setelah bantuan tersebut diserahkan, nampak pada malam hari seluruh petugas telah mengatur arus lalu lintas dengan senter pengatur sehingga memberikan kesan semarak dan sangat memudahkan pengemudi menerima isyarat pengaturan oleh petugas Polri, bahkan seorang petugas Pam Lebaran di Pantura mengatakan bahwa bantuan senter pengatur lalu lintas ini sangat berguna dan sangat tepat membantu pelaksanaan tugas Polri, serta berharap di tahun depan bantuan-bantuan tersebut bisa ditingkatkan lagi.\*\*\*



# TIPS DAN KIAT AMAN MENGENDARAI SEPEDA MOTOR

SEPEDA motor merupakan salah satu kendaraan yang sangat praktis dan relatif mudah di kendarai. Akan tetapi mengendarai sepeda motor membutuhkan perhatian dan konsentrasi yang tinggi. Ketahanan fisik mengendarai sepeda motor lebih cepat menurun dari pada mengemudi mobil.

Untuk itu berikut disajikan Tips dan kiat bagi pengendara sepeda motor (kendaraan R2).

1. Sebelum anda melakukan perjalanan berdoalah dan cek & recheck kondisi kendaraan anda dengan baik dan jangan lupa memakai helm.
2. Siapkan dan bawa kelengkapan administrasi sepeda motor anda.
3. Berjalanlah pada lajur paling kiri.
4. Selama dalam perjalanan pusatkan perhatian anda tanpa terpengaruh kepada kendaraan

lain, serta patuhi segala rambu-rambu, isyarat lalu lintas, marka jalan dan petunjuk petugas.

5. Jaga jarak dengan kendaraan di depan anda oleh karena kendaraan tersebut bisa saja melakukan pemberhentian dan membelok secara mendadak.
6. Bilamana menguntit bis amati gerak-gerik tangan kondektur akan bergerak kekiri atau bahkan berhenti, juga pengendara mobil lain amati sikapnya dari kaca spion dalam mobil itu.
7. Jangan melaju cepat bilamana traffic ight (lampu merah) telah berwarna hijau oleh karena bisa saja kendaraan lain masih melintas.
8. Saat akan mendahului buat jarak sambil mengarahkan kendaraan anda agak kekanan guna dapat melihat kendaraan yang datang dari arah berlawanan bila perlu bunyikan klakson atau nyalakan lampu jauh (beam)
9. Jangan memaksakan diri melaju disela-sela mobil dikhawatirkan ada orang "nyelonong" anda tak punya ruang untuk mengelak.
10. Melintasi jalan yang digunakan untuk parkir jangan terlalu rapat dikhawatirkan mobil buka pintu, selain itu waspada bila melalui pangkalan truk, pompa bensin, bengkel atau pabrik, ditempat tersebut bisa saja ada ceceran oli atau cairan lainnya.
11. Kendalikan emosi, jangan mudah terpancing dengan suasana yang dapat merugikan anda, berikan kesempatan bagi pejalan kaki yang sedang menyeberang/melintas didepan anda.

*"Anda Waspada, keselamatan ada ditangan anda,"*





WILAYAH Indonesia merupakan pasar yang sangat menjanjikan bagi kalangan pengedar Narkoba, bahkan wilayah Indonesia mereka anggap sebagai surga Narkotika karena banyaknya celah yang dapat digunakan untuk menyelundupkan Narkoba, ini dapat dibuktikan dari penemuan 955 kilogram sabu-sabu milik Ah Kwang dli Tangerang yang diselundupkan melalui 6 tempat tetapi baru 3 yang diketahui yaitu : Muara Sungai Cisadane, 50 mil laut sebelah timur laut pelabuhan Tanjung Priok atau 63 mil laut dari Tanjung Pasir, Teluk Naga Tangerang dan di wilayah laut ujung Karawang Jawa Barat sedang 3 titik lagi masih dalam identifikasi.

Dari kenyataan tersebut di atas, tidaklah heran jika dikatakan bahwa Indonesia merupakan pasar terbesar Narkoba dan menjadi surga bagi mafia jaringan Narkoba di dunia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya barang bukti Narkoba yang ditemukan dari hasil penggerebekan dan penangkapan tersangka serta ditemukannya beberapa pabrik dan tempat pembuatan ekstasi, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Lembar Pensat Divhumas Polri Edisi No : 37IX/2006/Pensat Tanggal 15 September 2006 tentang "Jangan Lengah Terhadap Narkoba".

Ada 48 jalur laut Indonesia yang digunakan sindikat Internasional menyelundupkan maun menjadi tempat transaksi Narkoba, yang tersebar dalam 39 pelabuhan, yaitu : Malahayati, Sabang, Tanjung Bulu Asahan, Kuala Tanjung, Teluk Bayur,

# Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Pelabuhan yang Menjadi Jalur Narkoba

Jambi, Dumai, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Batam, Bagan Siapiapi, Tanjung Balai Karimun, Panjang, Cirebon, Merak, Riau, Cilacap, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Tanjung Priok, Banjarmasin, Bali, Papua, Tarakan, Samarinda, Nunukan, Tanjung Sangata, Makassar, Bitung, Pontianak, Kupang, Ambon, Ternate, Jayapura Sorong, Biak, Tanjung Ubai Palah.

Selain ke-39 pelabuhan tersebut di atas, masih banyak pelabuhan tikus yang digunakan para sindikat untuk menyelundupkan dan tempat transaksi Narkoba ke-39 pelabuhan tersebut di atas adalah pelabuhan terbuka dan bebas sehingga pengawasan dan sistem pengamanan perlu ditingkatkan.

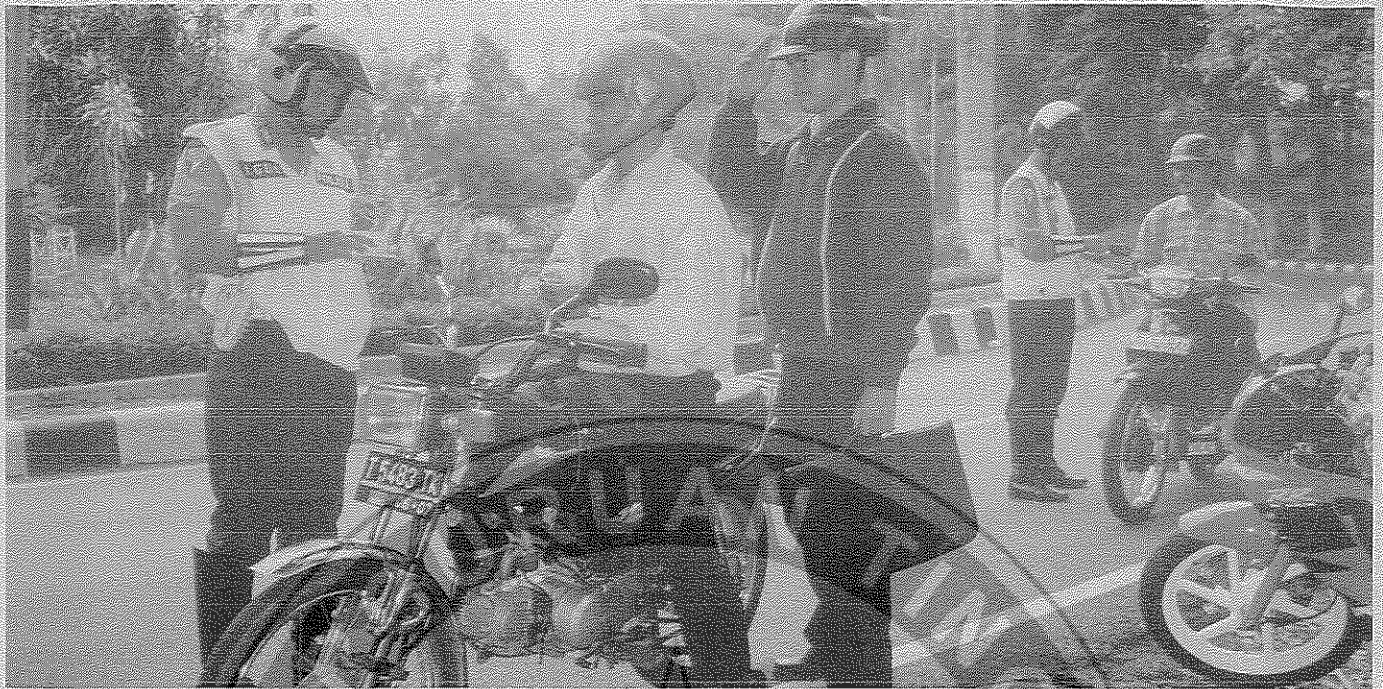
Sehubungan dengan banyaknya jalur yang dapat digunakan untuk menyelundupkan Narkoba di wilayah Indonesia sebagaimana tersebut di atas, kepada Kasatwil/Kasatker agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap daerah-daerah pelabuhan dan muara-muara sungai yang ada di wilayahnya khususnya ke-39 pelabuhan yang telah disebutkan di atas.

2. Adakan koordinasi antar instansi yang ada di pelabuhan dengan pihak Imigrasi, Bea Cukai dan TNI-AL untuk mempersempit ruang gerak penyelundupan khususnya Narkoba.
3. Meningkatkan patroli secara rutin di tempat-tempat yang dianggap rawan penyelundupan khususnya muara-muara sungai dan pelabuhan tikus yang jarang dilalui oleh kapal dan manusia
4. Menekankan kepada seluruh anggota di wilayah jajarannya untuk segera melaporkan kepada kesatuan bilamana menemukan adanya suatu penyelundupan maupun transaksi Narkoba dan menolak sogokan dalam bentuk apapun khususnya dari para penyelundup maupun sindikat Narkoba untuk meloloskan barang selundupannya.
5. Selalu mengajak dan menghimbau masyarakat yang bekerja atau tinggal di seputar pelabuhan maupun di sekitar muara-muara sungai bilamana menemukan hal-hal yang mencurigakan agar segera melapor ke Kantor Kepolisian terdekat atau kepada anggota Polri yang terdekat.\*\*\*







## Jangan Biarkan Rampok Bergentayangan

KASUS perampokan menjelang Idul Fitri akhir-akhir ini semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemberitaan tentang perampokan di media cetak maupun media elektronik beberapa hari ini antara lain : "Maraknya Perampokan Bersenjata Api", *Media Indonesia* halaman XI Tanggal 2 Oktober 2006, "Perampokan di Purwakarta Tidak Terkait Aksi Terorisme", *Suara Pembaruan* Tanggal Halaman IV, Tanggal 12 Oktober 2006, "Ibu Rumah Tangga Dibunuh", *Media Indonesia* halaman VII, Tanggal 12 Oktober 2006, "Aksi Perampokan Jelang Lebaran Kian Marak", *Media Indonesia* halaman VII, Tanggal 17 Oktober 2006.

Menurut Kriminolog Prof. Dr. Tubagus Ronny Rachman Niti-baskara : Perampokan terjadi akibat warga yang terdesak kebutuhan, terjadi kesenjangan ekonomi, dan realitas orang kecil yang termarginalisasi. ditengah kehi-

dupan yang semakin berat seperti sekarang, tidak aneh bila muncul berbagai kasus perampokan, khususnya menjelang peristiwa penting seperti lebaran.

Polri yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk : memelihara keamanan dan ketertiban; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat tentu tidak membenarkan kondisi dan alasan seperti tersebut di atas untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum yaitu melakukan perampokan yang sadis sampai menghilangkan nyawa orang lain, hingga masyarakat menjadi resah dan takut.

Jika masyarakat menjadi resah, takut dan merasa tidak aman, maka masyarakat menyalahkan pemerintah dalam hal ini adalah Polri, karena tidak melaksanakan tugas yang diemban dengan baik; untuk itu, kepada Kasatwil/Kasat-

ker agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Laksanakan Patroli secara rutin di lingkungan pemukiman masyarakat, koordinasi dengan satuan pengamanan yang bertugas di tempat tersebut.
2. Terus menerus menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada khususnya bagi yang pulang mudik Lebaran harus yakin, bahwa rumah yang akan ditinggalkan sudan dalam keadaan aman dan jika perlu menitipkan kepada tetangga yang tidak pulang mudik Lebaran.
3. Perketat pengamanan menjelang Lebaran dan sesudah lebaran khususnya di lingkungan perumahan yang akan ditinggalkan mudik penghuninya.
4. Selalu menghimbau masyarakat bilamana akan membawa uang dalam jumlah yang banyak, agar selalu meminta pengawalan dari anggota Polri terdekat.
5. Ungkap dan kejar terus para pelaku perampokan yang belum tertangkap dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap jaringannya.\*\*\*



# Utamakan Pendekatan Ilmiah dalam Menginterogasi Tersangka

Di era reformasi saat ini, Polri dituntut dan diharapkan oleh masyarakat bekerja secara profesional dan proporsional khususnya dalam mengungkap suatu kasus, tetapi kenyataan di lapangan khususnya penyidik masih ada yang melakukan cara-cara berbau kekerasan baik fisik maupun mental dalam menginterogasi seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan.

Cara-cara berbau kekerasan baik fisik maupun mental dalam menginterogasi seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan merupakan pendekatan yang salah dan tidak relevan lagi, di era reformasi sekarang ini sebenarnya tidak dibenarkan dilakukan oleh Polri karena melanggar undang-undang maupun hak asasi manusia (HAM), hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan anggota dalam menggali informasi dari seseorang yang diduga melakukan kejahatan. Padahal Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 183 dan 184 menyatakan minimal sekurang-kurangnya dua dari lima alat bukti yang sah untuk menyatakan tindak pidana benar-benar terjadi. Adapun alat bukti yang sah tersebut adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada Kasatwil/Kasatker agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Selalu menekankan kepada seluruh anggota di wilayah jajarannya khususnya penyidik agar tidak melakukan cara-cara berbau kekerasan baik fisik maupun mental dalam



menginterogasi seseorang yang diduga melakukan tindakan kejahatan.

2. Menyampaikan kepada seluruh anggota khususnya penyidik agar menggunakan pendekatan ilmiah yaitu mengedepankan aspek sosiologis, antropologis dan psikologis dalam melakukan interogasi terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan kejahatan.
3. Secara rutin mengadakan test psikologi bagi anggota penyidik di bagian psikolog dalam rangka mengecek dan mengetahui kejiwaan anggota dan bilamana hasil test tidak memungkinkan kembali sebagai penyidik se-

baiknya segera dipindahkan ke bagian staf atau bagian lain.

4. Mendorong seluruh anggota khususnya penyidik untuk mengikuti pendidikan kejuruan berkaitan dengan bidang tugasnya.
5. Tidak henti-hentinya mengarahkan setiap saat anggotanya untuk bekerja secara profesional, dan bilamana mendapatkan anggota yang berprestasi agar diberikan penghargaan sebagaimana mestinya, tetapi bilamana mendapatkan anggota yang melakukan perbuatan melanggar hukum agar ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.\*\*\*